

PENERAPAN INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI DAERAH PESISIR DALAM KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT UNTUK MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT

NENG SURYANTI NENGSIH

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Raja Haji Tanjungpinang

Email: nengsuryantinengsih@gmail.com

Abstrak

Sumber daya dan lautan merupakan potensi penting dalam pembangunan masa depan dengan berbagai kekayaan keanekaragaman hayati dan lingkungan di laut. Sumber daya pesisir dan laut mempunyai nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi. Guna menjamin keberlanjutan dari sumber daya tersebut pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terutama untuk masyarakat pesisir. Untuk mengetahui potensi keanekaragaman hayati di wilayah pesisir serta mengembangkan pembangunan berkelanjutan di daerah pesisir. Dari sector ekonomi, daerah pesisir dapat dikembangkan sebagai daerah wisata. Tentunya dengan pengolahannya yang bagus. Kelestarian wilayah pesisir itu tetap terjaga agar pembukaan wilayah pesisir sebagai daerah wisata dapat berupa wisata pendidikan. Setiap pengunjung yang datang di wilayah pesisir diberikan se bentuk kegiatan pendidikan untuk menjaga kebersihan dan tidak merusak wilayah tersebut. Selain sector ekonomi, sector sosial dan budaya juga mempengaruhi pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir kebiasaan hidup masyarakat setempat yang diatur oleh adat dan norma dapat menjaga hingga generasi seterusnya, dan yang terakhir pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dapat ditinjau dari segi lingkungan hidup pengadaaan. Pengelolaan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan sumberdaya alam di suatu tempat di mana masyarakat local di tempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Strategi pengembangan masyarakat dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu, yang bersifat structural dan non-struktural. Konsep pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan berfokus pada karakteristik ekosistem pesisir yang bersangkutan, yang dikelola dengan memperhatikan aspek parameter lingkungan, konservasi, dan kualitas hidup masyarakat, yang selanjutnya diidentifikasi secara komprehensif dan terpadu melalui kerjasama masyarakat, ilmuwan dan pemerintah untuk menemukan strategi – strategi pengelolaan pesisir yang tepat.

Key words: Pembangunan Berkelanjutan, Pesisir, Pengelolaan

PENDAHULUAN

Pada dasarnya indicator kinerja harus dapat menggambarkan keadaan sistem (dalam hal ini sumber daya keanekaragaman hayati laut) dan hasil dari segenap kebijakan serta program pengelolaan dalam hubungannya dengan tujuan yang telah

ditetapkan. Di dunia saat ini telah berkembang berbagai macam indikator pembangunan berkelanjutan (Kuik dan Verbruggen (Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, Ms; 2003: 326). Akan tetapi menurut hemat penulis, indikator pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati laut minimal harus meliputi 4 dimensi yaitu : (1) ekonomi, (2) sosial, (3) ekologi, (4) pengaturan (**governance**).

Indonesia sebagai Negara kepulauan dan maritim terbesar di dunia, yang terletak di kawasan tropis, memiliki tingkat keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia (**mega marine biodiversity**) dan kondisi alam pantai serta laut yang indah. Indonesia dengan luas perairan laut 5,8 juta km² merupakan salah satu Negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi dengan tingkat endemisme yang tinggi, khususnya di pulau Sulawesi, Irian jaya, dan Mentawai.

Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, wilayah daratan Indonesia (1,9 juta km²) tersebar pada sekitar 17.500 buah pulau yang disatukan oleh laut yang sangat luas (sekitar 5.8 juta km²). Panjang garis pantai yang mengelilingi daratan tersebut adalah sekitar 81.000 km, yang merupakan garis pantai tropis terpanjang atau terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Secara geografis kepulauan dan perairan Indonesia terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia; dan antara benua Asia dan Australia, termasuk di dalamnya paparan Sunda bagian barat dan Paparan Sahul di bagian timur. Wilayah pesisir dan lautan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Tingginya keanekaragaman hayati tersebut bukan hanya dibutuhkan oleh letak geografis yang sangat strategis, melainkan juga dipengaruhi oleh factor seperti variasi iklim musiman, arus atau massa air laut yang dipengaruhi oleh massa air dari dua Samudera serta keragaman tipe habitat dan ekosistem yang terdapat di dalamnya.

Keanekaragaman hayati pesisir dan lautan Indonesia hadir dalam bentuk ekosistem terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria, pantai, laut terbuka dan laut jeluk (laut dalam). Berbagai ekosistem tersebut tersebut saling berhubungan secara sinergis melalui aliran arus air dan migrasi biota. Tingginya keanekaragaman hayati di wilayah pesisir dan lautan Indonesia, baik dalam bentuk keanekaragaman genetic, spesies maupun ekosistem merupakan asset yang sangat berharga untuk menunjang pembangunan ekonomidi Indonesia. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi keanekaragaman hayati yang dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, baik yang bersifat langsung (misalnya sumber bahan

pangan dan minuman, obat – obatan, kosmetika, dan pupuk) maupun tidak langsung (seperti, penahan ombak, daerah pemijahan, siklus nutrien).

Sebagaimana tercantum dalam GBHN 1993, pembangunan jangka panjang tahap II mengarahkan pembangunan nasional untuk mendayagunakan dan memanfaatkan potensi sumber daya nasional menjadi kekuatan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan yang nyata serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan manajemen wilayah pesisir dan lautan sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Wilayah pesisir dan lautan yang meliputi daratan dan perairan pesisir sangat penting artinya bagi bangsa dan ekonomi Indonesia. Wilayah ini bukan saja terkandung sumber pangan yang diusahakan melalui kegiatan perikanan dan pertanian, tetapi juga berbagai jenis sumber daya alam dan jasa lingkungan, seperti sumber daya mineral, gas dan minyak bumi, pemandangan alam yang indah, dan media perhubungan laut yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia.

Di daratan pesisir, terutama di sekitar muara – muara sungai besar, berkembang pesat pusat – pusat pemukiman manusia yang disebabkan oleh kesuburan daerah muara sungai dan relative lancarnya mobilitas masyarakat melalui media sungai dan perairan pantai. Bukan saja bagian terbesar kota – kota besar di Indonesia, yang pada umumnya merupakan pusat perdagangan, terletak di wilayah pesisir, tetapi dewasa ini pengembangan kawasan industry juga berlangsung di wilayah pesisir. Jadi nampaknya sumber daya alam di wilayah pesisir Indonesia telah dimanfaatkan secara beraneka ragam. Namun perlu diperhatikan agar kegiatan yang beraneka raga ini dapat berlangsung secara serasi.

Salah satu fungsi pembangunan daerah pesisir dan keanekaragaman hayati laut adalah memberikan pembangunan kepada masyarakat pesisir serta mengembangkan hayati laut di daerah tersebut. pembangunan daerah pesisir untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sasaran pembangunan wilayah pesisir juga untuk mewujudkan kedaulatan atas wilayah perairan. Sementara pasal 2, konvensi tentang keanekaragaman hayati (conersation on biological diversity, CBD) mendefenisikan bahwa keanekaragaman hayati sebagai variasi yang terdapat diantara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya ekosistem daratan, lautan dan ekosistem perairan lain.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Kuik dan Verbruggen (Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, Ms ; 2003:326) menyatakan bahwa di dunia saat ini telah berkembang berbagai macam indicator pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi menurut hemat penulis, indicator pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati laut minimal harus meliputi 4 dimensi yaitu :

1. Ekonomi

Indikatornya pada volume dan nilai produksi; volume dan nilai ekspor (dibandingkan dengan nilai total ekspor nasional); kontribusi sector perikanan terhadap PDB ; pendapatan nelayan; nilai inventasi dalam bentuk kapal ikan dan pabrik pengolahan.

2. Sosial

Indikatornya terdapat pada penyerapan tenaga kerja; budaya kerja; tingkat pendidikan; tingkat kesehatan; distribusi jender dalam proses pengambilan keputusan (*gender distribution in decisionmaking*); kedudukan (*demography*).

3. Ekologi

Indikatornya terdapat pada komposisi hasil tangkap; hasil tangkap persatuan upaya (CPUE); kelimpahan relative spesies target; dampak langsung alat tangkap terhadap spesies non target; dampak tidak langsung penangkapan seperti struktur trofik; dampak langsung alat tangkap terhadap habitat; perubahan luas area dan kualitas habitat penting perikanan.

4. Pengaturan

Indikatornya terdapat pada hak kepemilikan (*property rights*); ketaatan terhadap peraturan perundangan (*compliance regime*); transparansi dan partisipasi.

Menurut Suparmoko (Daeng Ayub Natuna, Rumzi Samin, dkk: 2009: 196) sumberdaya alam (natural resource) pada dasarnya mempunyai pengertian segala sesuatu yang berada di bawah atau di atas bumi, termasuk tanah itu sendiri. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan merupakan potensi ekonomi strategis dengan nilai jual yang tinggi, secara khusus, potensi

sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan wisata yang memberikan kontribusi penerimaan daerah yang cukup.

Beberapa pakar yang memberikan rumusan makna dari pembangunan yang berkelanjutan itu antara lain:

1. Emil Salim, yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan sustainable development adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan dari sumber daya alam sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan.
2. Ignas Kleden, pembangunan berkelanjutan di sini untuk sementara di definisikan sebagai jenis pembangunan yang di satu pihak mengacu pada pemanfaatan sumber – sumber alam maupun sumber daya manusia secara optimal, dan di lain pihak serta pada saat yang sama memelihara keseimbangan optimal di antara berbagai tuntutan yang saling bertentangan terhadap sumber daya tersebut.
3. Sofyan Effendi
 - a. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, arah investasinya, orientasi pengembangannya teknologinya dan perubahan kelembangannya dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperlihatkan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
 - b. Secara konseptual, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi dan politik untuk meningkatkan kepastian masyarakat Indonesia dalam memenuhi kepentingannya pada saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kepentingan mereka.

<http://riaangreinibio.blogspot.co.id/2012/05>

Menurut Undang – Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dan menjelaskan tentang mengapa kita harus melaksanakan “Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Hidup” seperti pada pertimbangan huruf b, bahwa dalam rangka mendayagunakan sumberdaya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan

kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan.

Beberapa karakteristik yang umum dijumpai di pulau – pulau kecil dapat dikategorikan ke dalam aspek lingkungan hidup dan sosial-ekonomi-budaya. Karakteristik yang berkaitan dengan lingkungan hidup menurut Brookfield (Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, Ms: 2003: 80) antara lain :

1. Pulau – pulau kecil memiliki daerah resapan yang sempit, sehingga sumber tanah yang tersedia sangat rentan terhadap pengaruh instruksi air laut, terkontaminasi akibat nitrifikasi dan kekeringan.
2. Pulau – pulau kecil memiliki daerah pesisir yang sangat terbuka (ratio antara panjang garis pantai dengan luas area relative besar), sehingga lingkungannya yang berasal dari badai *cyclone* dan tsunami.
3. Spesies organisme yang hidup di pulau – pulau kecil pada umumnya bersifat endemic dan perkembangannya lambat, sehingga mudah tersaingi oleh organisme tertentu yang didatangkan dari luar pulau.
4. Pulau – pulau kecil memiliki sumber daya alam terrestrial yang sangat terbatas, baik yang berkaitan dengan sumber daya alam mineral, air tawar maupun dengan kehutanan dan pertanian.

Selanjutnya karakteristik yang berkaitan dengan factor sosial-ekonomi-budaya menurut Hein (Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, Ms: 2003: 80-81) antara lain adalah :

1. Pulau – pulau kecil memiliki infrastruktur yang sangat terbatas sehingga sulit mengundang kegiatan bisnis dari luar pulau (diseconomies of scale).
2. Pulau – pulau kecil memiliki pasar domestic dan sumber daya alam yang kecil, sehingga iklim usahanya kurang kompetitif. Hal ini akan mempersulit terjalannya kerja sama melalui perdagangan internasional yang sangat kompetitif.
3. Kegiatan ekonomi di pulau – pulau kecil sangat terspesialisasi, yakni untuk ekspor dan tergantung pada impor. Secara historis hal ini mungkin dipengaruhi oleh kebiasaan pada zaman colonial, di mana wilayah daratan pulau – pulau kecil hanya dikembangkan untuk penanaman rempah – rempah, kelapa, atau coklat.

4. Pulau – pulau kecil biasanya sangat tergantung pada bantuan luar meskipun memiliki potensi sebagai tempat yang posisinya bernilai strategis.
5. Penduduk pulau – pulau kecil jumlahnya tidak banyak dan biasanya mereka saling mengenal satu sama lain serta terikat oleh hubungan persaudaraan. Hal ini akan menyulitkan pengambilan kebijakan, proses administrasi, dan manajemen program kegiatan.

Beberapa jenis potensi yang umumnya dimiliki pulau – pulau kecil untuk menunjang pembangunan berkelanjutan menurut Dolman (Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, Ms: 2003: 83-84) adalah :

1. Pengembangan Perikanan Rakyat (*Artisanal Fishery*)
2. Pengembangan Marikultur (*Marine Culture*)
3. Pengembangan Pelayanan Jasa.

KONSEP PENGELOLAAN PESISIR SECARA TERPADU DAN BERKELANJUTAN YANG BERBASIS MASYARAKAT

A. Pengelolaan Pesisir Terpadu

Menurut Sain dan Kreth (lukita purnamasari; 2009: 2) Pengelolaan Pesisir Terpadu (P2T) adalah proses yang dinamis yang berjalan secara terus menerus, dalam membuat keputusan-keputusan tentang pemanfaatan, pembangunan dan perlindungan wilayah dan sumberdaya pesisir dan lautan. Bagian penting dalam pengelolaan terpadu adalah perancangan proses kelembagaan untuk mencapai harmonisasi dalam cara yang dapat diterima secara politis.

B. Pengelolaan Pesisir Secara Berkelanjutan

Suatu kegiatan dikatakan keberlanjutan, apabila kegiatan pembangunan secara ekonomis, ekologis dan sosial politik bersifat berkelanjutan. Berkelanjutan secara ekonomi berarti bahwa suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahakan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan capital (*capital maintenance*), dan penggunaan sumberdaya serta investasi secara efisien. Berkelanjutan secara ekologis mengandung arti, bahwa kegiatan dimaksud harus dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati (*biodiversity*), sehingga diharapkan pemanfaatan sumberdaya dapat berkelanjutan. Sementara itu, berkelanjutan

secara sosial politik mensyaratkan bahwa suatu kegiatan pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat (dekratisasi), identitas sosial, dan pengembangan kelembagaan Wiyana (lukita purnamasari; 2009: 2).

C. Pengelolaan Pesisir Berbasis Masyarakat

Pengelolaan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai suatu system pengelolaan sumber daya alam disuatu tempat dimana masyarakat lokal ditempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya alam yang terkandung didalamnya Nurnmalasari (lukita purnamasari; 2009: 3).

Di Indonesia pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat sebenarnya telah ditetapkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut secara tegas menginginkan agar pelaksanaan penguasaan Negara atas sumber daya alam khususnya sumber daya pesisir dan lautan diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat banyak, dan juga harus mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan sekaligus memperbaiki kehidupan masyarakat pesisir serta memajukan desa-desa pantai.

KONSEP PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN POTENSI DI PESISIR

Secara alamiah potensi pesisir di daerah dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan tersebut yang pada umumnya terdiri dari nelayan. Nelayan di pesisir memanfaatkan kekayaan laut mulai dari ikan, rumput laut, terumbu karang dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada umumnya potensi pesisir dan kelautan yang di dimanfaatkan oleh nelayan terbatas pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup.

Pemanfaatan potensi daerah pesisir secara besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dalam rangka peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat belum banyak dilakukan. Pemanfaatan pesisir untuk usaha

ekonomi dalam skala besar baru dilakukan pada sebagian Kabupaten dan Kota yang berada di daerah pesisir. Pada umumnya usaha ekonomi pemanfaatan daerah pesisir ini bergerak disektor pariwisata.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah berupaya untuk memanfaatkan potensi daerah pesisir ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disamping itu Pemerintah Daerah juga memanfaatkan potensi daerah pesisir ini untuk meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian masyarakat di daerah.

Mengingat kewenangan daerah untuk melakukan pengelolaan bidang kelautan ang termasuk juga daerah pesisir masih merupakan kewenangan baru bagi daerah maka pemanfaatan potensi daerah pesisir ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten atau kota yang berada di pesisir. Jadi belum semua Kabupaten dan Kota yang memanfaatkan potensi daerah pesisir.

PERMASALAHAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN PESISIR

Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir yang dilakukan oleh masyarakat maupun daerah sebagian belum memenuhi ketentuan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan. Hal ini akan berpengaruh terhadap kondisi dan kelestarian pesisir dan lingkungannya. Penyebab degradasi kondisi daerah pesisir secara tidak langsung juga disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam di hulu yang berpengaruh terhadap muara di pesisir. Kebijakan reklamasi yang tidak berdasarkan kepada analisa dampak lingkungan pada beberapa daerah juga berpengaruh terhadap ekosistem dipesisir. Perizinan pengembangan usaha bagi kelangan dunia usaha selama ini sebagian besar menjadi kewenangan pusat. Kadangkala dalam hal ini pemberian izin tersebut tanpa memperhatikan kepentingan daerah dan masyarakat setempat.

Jika kita perhatikan berbagai permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemanfaatan dan pengelolaan daerah belum diatur dengan peraturan perundang-undangan yang jelas, sehingga daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan sesuatu kebijakan.
2. Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir cenderung bersifat sektoral, sehingga kadangkala melahirkan kebijakan yang tumpang tindih satu sama lain.

3. Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir belum memperhatikan konsep daerah pesisir sebagai suatu kesatuan ekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif pemerintahan, sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antar daerah
4. Kewenangan daerah dalam rangka otonomi daerah belum dipahami secara komprehensif oleh para stakeholders, sehingga pada setiap daerah dan setiap sector timbul berbagai pemahaman dan penafsiran yang berbeda dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir.

Isu-isu penting yang perlu segera diluruskan dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir ke depan antara lain, yaitu :

1. Adanya kesan bahwa sebagian daerah melakukan pengkaplingan wilayah laut dan pantainya. Untuk itu perlu diterapkan oleh pusat pedoman bagi pelaksanaan kewenangan daerah di bidang kelautan.
2. Pemanfaatan daerah terhadap daerah pesisir sebagai suatu kesatuan ekosistem yang tidak dibatasi oleh batas wilayah administrative pemerintahan.
3. Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir secara alami dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian literatur, dengan menggunakan data sekunder. Dimana Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah menggunakan metode pengutipan dari berbagai sumber yang ada baik itu media internet maupun dikutip melalui buku yang kemudian dikaitkan dengan masalah yang terdapat pada pendahuluan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan tersebut dapat dilakukan berbagai aspek dipembangunan berkelanjutan pada wilayah pesisir yang pertama. Dari sektor ekonomi, daerah pesisir dapat dikembangkan sebagai daerah wisata. Tentunya dengan pengolahan yang bagus. Kelestarian wilayah pesisir itu tetap terjaga agar pembukaan wilayah pesisir sebagai daerah wisata dapat berupa wisata pendidikan. Setiap pengunjung yang datang di wilayah pesisir diberikan sebetuk kegiatan pendidikan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak merusak wilayah

tersebut. Selain sektor ekonomi, sektor sosial dan budaya juga mempengaruhi pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir kebiasaan hidup masyarakat setempat yang diatur oleh adat dan norma dapat menjaga hingga generasi seterusnya, dan yang terakhir pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dapat ditinjau dari segi lingkungan hidup pengadaaan. Konservasi lahan dan pengendalian ekosistem di wilayah pesisir tetap tertata dan dapat dikembangkan serta tetap ada dan diharapkan kelestariannya tetap terjaga dan pembangunan tetap dilanjutkan hingga kekayaan pesisir dapat diwariskan kegenerasi selanjutnya maupun seterusnya. Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir yang dilakukan oleh masyarakat maupun daerah sebagian belum memenuhi ketentuan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan serta berpengaruh terhadap kondisi daerah pesisir secara tidak langsung.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan saat ini tanpa perlu merusak atau menurunkan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Wilayah pesisir memiliki nilai strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap kerusakan dan perusakan. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan yang bijaksana dengan menempatkan kepentingan ekonomi secara proporsional dengan kepentingan lingkungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pengelolaan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan sumber daya alam disuatu tempat dimana masyarakat lokal ditempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Strategi pengembangan masyarakat dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu, yang bersifat struktural dan non-struktural. Konsep pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan berfokus pada karakteristik ekosistem pesisir yang bersangkutan, yang dikelola dengan memperhatikan aspek parameter lingkungan, konservasi, dan kualitas hidup masyarakat, yang selanjutnya diidentifikasi secara komprehensif dan terpadu melalui kerjasama masyarakat, ilmuan dan pemerintah, untuk menemukan strategi-strategi pengelolaan pesisir yang tepat dan konsep pengelolaan pesisir secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis masyarakat terdiri dari pengelolaan pesisir terpadu,

pengelolaan pesisir secara berkelanjutan, pengelolaan pesisir berbasis masyarakat. Konsep pemanfaatan dan pengelolaan potensi di pesisir secara alamiah dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan tersebut yang pada umumnya terdiri dari nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

Dahuri, Rokhmin. 2003. *Keanekaragaman Hayati Laut*. Jakarta: Gramedia.

Natuna, Ayub Daeng, Samin, Rumzi, Akhyari, Edy. 2009. *Pendidikan dan Pembangunan Berbasis Maritim*. Tanjungpinang; UMRAH PRESS dan UR PRESS

Purnamasari, Lukita; 2009; "Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, Wilayah Pesisir"

Urip Santoso; *Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat*, Jakarta.

Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 33 Sumber daya Berbasis Masyarakat

Undang – Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Website:

<http://riaangreinibio.blogspot.co.id/2015/05>; didownload tanggal 29 Maret 2016